

Efektivitas dana desa di kabupaten hulu sungai tengah

Arif Maulana^{1*}, Nugrahayu Suryaningrum²

¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.

¹Email: maulana127041@gmail.com

Abstrak

Sejak tahun 2015 pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan untuk mengatasi kemiskinan yaitu memberikan dana desa ke seluruh desa di berbagai kabupaten di Indonesia salah satunya Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dana desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Analisis dalam penelitian ini menggunakan uji-t sampel berpasangan, serta uji-t sampel independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan signifikan Indeks Pembangunan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebelum dan sesudah adanya dana desa. Temuan penting yang harus diperhatikan dalam penelitian ini adalah belum efektifnya dana desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ditandai dengan tidak terjadinya penurunan tingkat pengangguran terbuka, angka kemiskinan, dan gini ratio secara signifikan meskipun pemerintah sudah memberikan dana desa yang cukup besar.

Kata Kunci: Indeks pembangunan desa; kemiskinan; pengangguran; potensi desa

Effectiveness of village funds in hulu sungai tengah regency

Abstract

Since 2015 the government has issued a policy to overcome poverty by providing village funds to all villages in Indonesia, one of them is the Hulu Sungai Tengah Regency. The purpose of this study was to determine the effectiveness of village funds in the Hulu Sungai Tengah Regency. The analysis in this study used paired sample t-tests and independent sample t-tests. The results showed that there was a significant increase in the Village Development Index of the Hulu Sungai Tengah Regency before and after the village funds. An important finding that must be considered in this study is the ineffectiveness of village funds in the Hulu Sungai Tengah Regency marked by a insignificant reduction in the level of open unemployment, poverty rates, and gini ratios even though the government has provided substantial village funds.

Keywords: *Village development index; poverty; unemployment; village potential*

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan distribusi pendapatan masyarakat yang merata. Keberhasilan pemerintahan dalam mencapai pembangunan ekonomi dapat dinilai dari penurunan gini ratio dan angka kemiskinan. Hal ini dikarenakan kemiskinan terkait dengan masalah kekurangan pangan dan gizi, keterbelakangan pendidikan, kriminal, pengangguran, prostitusi, dan masalah-masalah lain yang bersumber dari rendahnya tingkat pendapatan perkapita penduduk, Todaro (2000).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, kemiskinan Indonesia di wilayah perdesaan mencapai 13,10 persen pada tahun 2018. Angka tersebut hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan angka kemiskinan wilayah perkotaan yang hanya 6,89 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk miskin Indonesia masih didominasi di wilayah perdesaan. Perbedaan nyata yang terdapat di wilayah Indonesia adalah adanya ketimpangan perekonomian di wilayah perkotaan dan perdesaan. Sebagian besar penduduk perdesaan hidup di sektor pertanian yang meliputi sub sektor tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Selain itu, tingkat kesejahteraan penduduk, pendidikan, ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di desa cenderung lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan.

Pentingnya permasalahan kemiskinan, khususnya yang ada di wilayah perdesaan menuntut strategi pemerintah untuk mengatasinya. Sejak tahun 2015 pemerintah membuat suatu kebijakan baru sebagai upaya mengatasi kemiskinan di wilayah perdesaan yaitu memberikan dana desa ke seluruh desa di Indonesia. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengatasi besarnya kemiskinan di wilayah perdesaan, yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa, Putra, Pratiwi, & Suwondo, (2015).

Kebijakan dana desa sangat berbeda dengan kebijakan-kebijakan terdahulu yang pernah ada. Pada saat zaman orde baru, era sentralistik membuat pembangunan di desa menjadi seragam oleh pemerintah pusat. Program pembangunan desa lebih bersifat top-down, pemerintah pusat mengatur semua mekanisme pembangunan desa. Dalam era otonomi daerah, lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan saat ini pembangunan desa lebih diserahkan kepada desa itu sendiri. Otonomi desa tidak lagi menjadi sisa dari otonomi daerah kabupaten/kota (bersumber dari pemberian kabupaten), namun desa diberi keleluasaan untuk membangun desanya sesuai dengan potensi pendapatan asli desa tersebut. Sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan, dan pengawasan, Azwardi & Sukanto (2014).

Dana desa diberikan oleh pemerintah pusat ke seluruh desa yang tersebar di berbagai kabupaten di Indonesia salah satunya Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, dana desa untuk 161 desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah hampir selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 dana desa yang diberikan sebesar sebesar Rp 41 miliar, meningkat menjadi Rp 97 miliar pada tahun 2016, kembali meningkat menjadi Rp 123 miliar pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 menurun menjadi Rp 113 miliar.

Adanya dana desa memberi harapan yang terbuka bagi masyarakat untuk mengembangkan dan memajukan desa, terutama dalam bidang ekonomi berbasis masyarakat. Kelancaran pembangunan nasional diawali dari pembangunan ditingkat yang paling bawah yaitu pembangunan desa, Atmojo, Fridayani, Kasiwi, & Pratama, (2017). Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dana desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan agar penyaluran dana desa lebih efektif dalam membangun daerah perdesaan, menurunkan tingkat pengangguran, kemiskinan dan gini ratio. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

Terdapat peningkatan pembangunan perdesaan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebelum dan sesudah adanya dana desa.

Terdapat penurunan angka pengangguran Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebelum dan sesudah adanya dana desa.

Terdapat penurunan angka kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebelum dan sesudah adanya dana desa.

Terdapat penurunan gini ratio Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebelum dan sesudah adanya dana desa.

METODE

Uji-t sampel berpasangan

Uji-t sampel berpasangan (*paired samples t-test*) merupakan salah satu metode pengujian hipotesis dimana data yang diuji merupakan dua kelompok data yang saling berpasangan. Uji tersebut menghitung selisih antara nilai dua variabel untuk tiap kasus dan menguji apakah selisih rata-rata tersebut bernilai nol. Uji t berpasangan umumnya dilakukan pada subjek yang diuji untuk situasi sebelum dan sesudah proses. Dalam penelitian ini, dilakukan pengujian apakah ada peningkatan pembangunan desa sebelum dan sesudah adanya dana desa. Uji-t sampel berpasangan merupakan uji yang tepat karena penelitian ini menguji data IPD sebelum dan sesudah adanya dana desa untuk kelompok sampel yang sama, yaitu setiap desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Salah satu syarat menggunakan uji-t sampel berpasangan yaitu data yang diuji harus berdistribusi normal. Hipotesis dari uji-t sampel berpasangan dapat ditulis (Walpole, 1982):

$$H_0 : IPD_{2018} - IPD_{2014} = 0$$

$$H_1 : IPD_{2018} - IPD_{2014} > 0$$

Hipotesis ini menguji Indeks Pembangunan Desa (IPD) tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2014 untuk setiap desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Apabila H_0 diterima, berarti tidak ada peningkatan yang signifikan antara IPD sebelum dan sesudah adanya dana desa. Sedangkan apabila H_0 ditolak, berarti terdapat peningkatan yang signifikan antara IPD sebelum dan sesudah adanya dana desa.

Uji wilcoxon

Uji Wilcoxon merupakan alternatif dari uji-t sampel berpasangan. Uji tersebut bertujuan untuk menguji antara dua kelompok data yang saling berpasangan dan tidak memenuhi asumsi normalitas. Dalam penelitian ini, Uji Wilcoxon dilakukan untuk menguji data IPD sebelum dan sesudah adanya dana desa untuk kelompok sampel yang sama, yaitu setiap desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan yang tidak memenuhi asumsi normalitas. Hipotesis yang digunakan pada uji Wilcoxon adalah sebagai berikut, Siegel (1986):

$$H_0 : IPD_{2018} - IPD_{2014} = 0$$

$$H_1 : IPD_{2018} - IPD_{2014} \neq 0$$

Hipotesis ini menguji Indeks Pembangunan Desa (IPD) tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2014 untuk setiap desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Apabila H_0 diterima, berarti tidak ada peningkatan yang signifikan antara IPD sebelum dan sesudah adanya dana desa. Sedangkan apabila H_0 ditolak, berarti terdapat peningkatan yang signifikan antara IPD sebelum dan sesudah adanya dana desa.

Uji-t sampel independen

Uji-t sampel independen digunakan untuk menentukan apakah dari dua gugus sampel memiliki rata-rata yang sama. Dalam penelitian ini, uji tersebut digunakan untuk menguji penurunan tingkat pengangguran terbuka, angka kemiskinan dan *gini ratio* sebelum adanya dana desa (tahun 2010 sampai tahun 2014) dibandingkan dengan sesudah adanya dana desa (tahun 2015 sampai tahun 2018). Hipotesis yang digunakan pada uji-t sampel independen adalah sebagai berikut (Walpole, 1982):

$$H_0 : I_{2015.2018} - I_{2010.2014} = 0$$

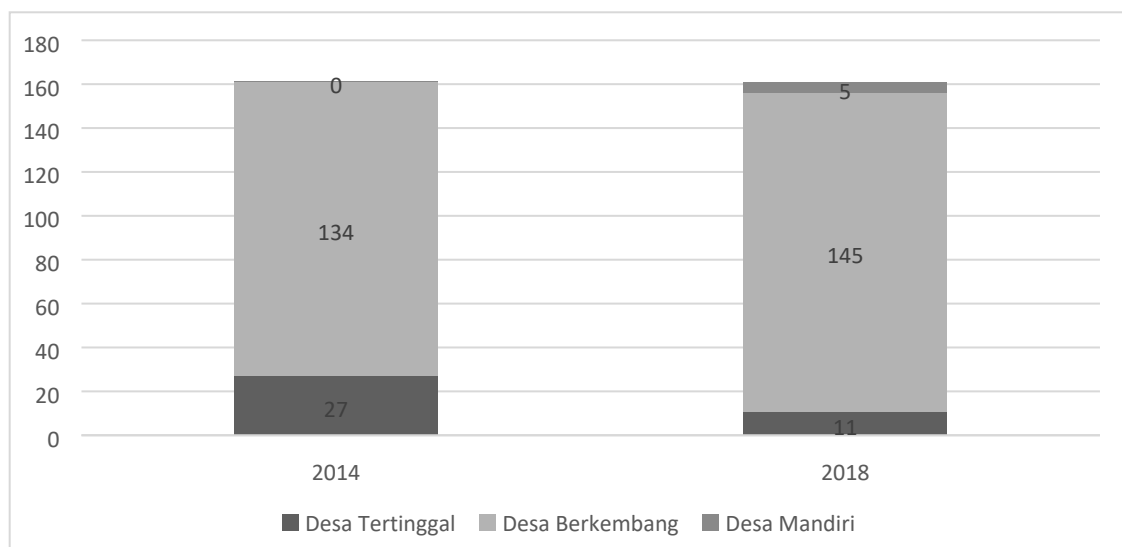
$$H_1 : I_{2015.2018} - I_{2010.2014} < 0$$

Apabila H_0 diterima, berarti tidak ada penurunan yang signifikan antara tingkat pengangguran terbuka, angka kemiskinan atau *gini ratio* sebelum dan sesudah adanya dana desa. Sedangkan apabila H_0 ditolak, berarti terdapat penurunan yang signifikan antara tingkat pengangguran terbuka, angka kemiskinan atau *gini ratio* sebelum dan sesudah adanya dana desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

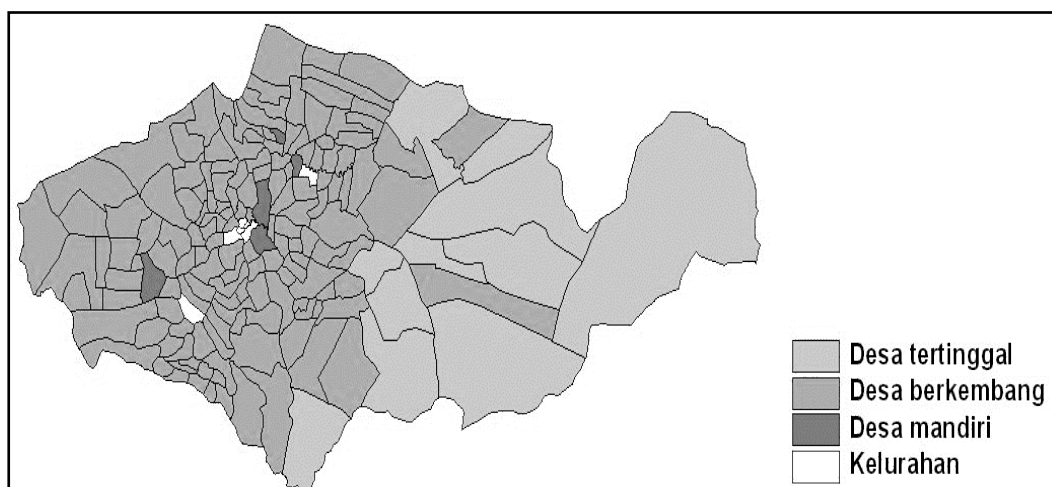
Perkembangan indeks pembangunan desa (ipd) kabupaten hulu sungai tengah

Berhasil atau tidaknya program pemerintah dalam membangun daerah perdesaan melalui dana desa dapat tercermin dari hasil pendataan Potensi Desa (Podes). Pendataan Podes dilakukan setiap tiga kali dalam sepuluh tahun oleh BPS. Pendataan terakhir dilakukan pada tahun 2011, 2014, dan 2018. Jika keadaan pada tahun 2018 (setelah adanya dana desa) dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2014 (sebelum adanya dana desa), terjadi kemajuan pembangunan desa yang cukup baik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.



Gambar 1. Kategori indeks pembangunan desa kabupaten hulu sungai tengah tahun 2014 dan 2018

Berdasarkan hasil pendataan Podes 2018, jumlah desa mandiri meningkat dari yang sebelumnya tidak ada pada tahun 2014 menjadi 5 desa pada tahun 2018. Sebaliknya, desa tertinggal semakin berkurang dari 27 desa pada tahun 2014 menjadi hanya 11 desa pada tahun 2018. Sementara jumlah desa berkembang meningkat dari 134 desa pada tahun 2014 menjadi 145 desa pada tahun 2018.



Gambar 2. Peta indeks pembangunan desa kabupaten hulu sungai tengah tahun 2018

Sebagian besar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan perdesaan. Terdapat 161 desa dan hanya ada 8 kelurahan. Berdasarkan Gambar 2., terlihat bahwa sebagian besar desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan desa berkembang. Meskipun pemerintah telah fokus membangun wilayah perdesaan, akan tetapi masih ada 11 desa tertinggal yang sebagian besar mempunyai tipologi wilayah pegunungan. Hal ini dikarenakan wilayah pegunungan sulit diakses, sarana dan prasarana kurang menunjang sehingga pembangunan di desa-desa tersebut menjadi terhambat.

Selain dilihat menggunakan grafik dan peta, untuk mengetahui perkembangan tingkat pembangunan desa bisa dilakukan dengan pengujian hipotesis peningkatan IPD sebelum dan sesudah adanya dana desa menggunakan Uji-t sampel berpasangan atau Uji Wilcoxon.

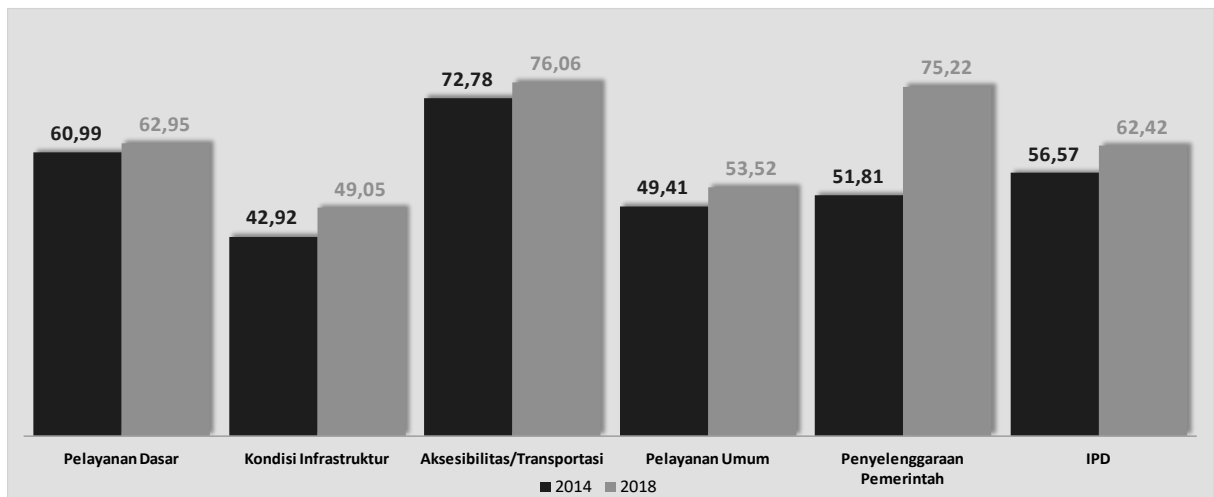
Uji normalitas

Sebelum melaksanakan pengujian hipotesis peningkatan IPD sebelum dan sesudah adanya dana desa, data diuji menggunakan Uji Kolmogorov Smirnov untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Data yang berdistribusi normal dilanjutkan dengan uji-t sampel berpasangan, sedangkan data yang tidak berdistribusi normal diuji menggunakan Uji Wilcoxon.

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan Uji Kolmogorov-Smirnov untuk selisih Indeks Pembangunan Desa (IPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200 (lebih besar dari 0,05) yang artinya data tersebut berdistribusi normal. Oleh karena itu, pengujian hipotesis perbedaan IPD sebelum dan sesudah digulirkannya dana desa menggunakan uji-t sampel berpasangan.

Pengujian hipotesis peningkatan ipd sebelum dan sesudah adanya dana desa

Setelah dilakukan Uji Kolmogorov-Smirnov yang menunjukkan data berdistribusi normal, kemudian dilanjutkan dengan menguji hipotesis peningkatan IPD sebelum dan sesudah adanya dana desa. Hasil pengujian menggunakan uji t berpasangan menunjukkan signifikansi sebesar 0,000 (sangat kecil mendekati 0 dan lebih kecil dari 0,05) yang artinya terdapat peningkatan yang signifikan antara IPD sebelum dan sesudah adanya dana desa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pembangunan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2018 (sesudah adanya dana desa) secara umum mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan pembangunan desa pada tahun 2014 (sebelum adanya dana desa).



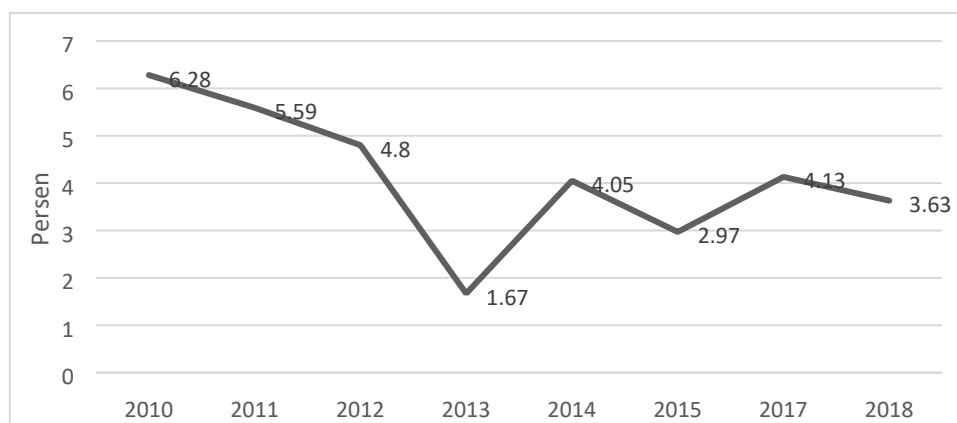
Gambar 3. Dimensi indeks pembangunan desa kabupaten hulu sungai tengah tahun 2014 dan 2018

Berdasarkan Gambar 3 di atas, Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami peningkatan untuk semua dimensi IPD yang terdiri dari dimensi pelayanan dasar, infrastruktur, pelayanan umum, transportasi, dan penyelenggara kegiatan pemerintah. Dimensi penyelenggara pemerintah desa merupakan dimensi dengan peningkatan tertinggi mencapai 75,22 pada tahun 2018 dibandingkan 51,81 pada tahun 2014. Beberapa peningkatan pada dimensi ini disebabkan desa yang memiliki bangunan desa meningkat 33 persen jika dibandingkan tahun 2014, desa yang memiliki sekretaris desa mencapai 98 persen, dan desa dengan sistem informasi desa yang diperbaharui mencapai 76 persen. Dimensi infrastruktur memiliki peningkatan tertinggi kedua yaitu 6,13. Peningkatan pada dimensi ini disebabkan

oleh beberapa hal, seperti semakin mudah akses membeli bahan bakar dengan peningkatan desa yang ada penjual LPG sebesar 31 persen dibandingkan tahun 2014, meningkatnya desa yang sebagian besar keluarganya menggunakan jamban sendiri sebesar 9 persen dibandingkan tahun 2014, dan semakin meningkatnya desa yang ada Base Transceiver Station (BTS) sebesar 63 persen dibandingkan tahun 2014.

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka kabupaten hulu sungai tengah

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Hulu Sungai Tengah berfluktuasi selama tahun 2010 hingga 2018. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2010 mencapai 6,28 persen, kemudian terus menurun hingga mencapai titik terendah 1,67 persen pada tahun 2013. Tingkat pengangguran berfluktuasi dan cenderung meningkat beberapa tahun setelahnya menjadi 3,63 persen pada tahun 2018.

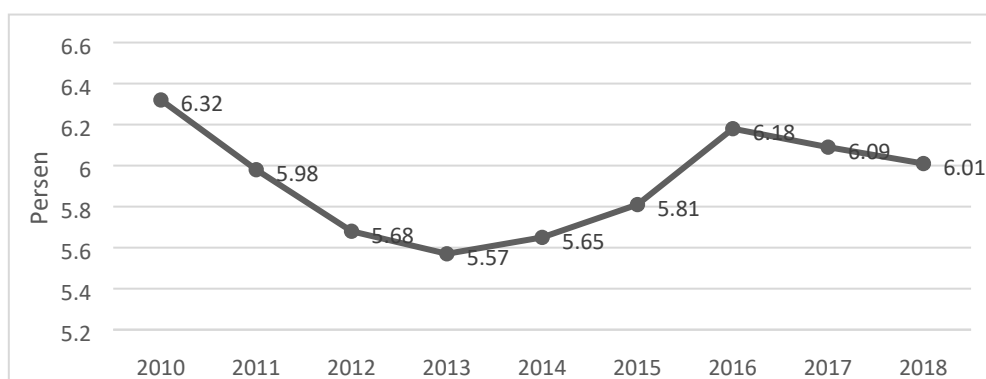


Gambar 4. tingkat pengangguran terbuka kabupaten hulu sungai tengah tahun 2010-2018

Setelah dilakukan pengujian menggunakan Uji Kolmogorov Smirnov terhadap data tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dilanjutkan dengan pengujian uji-t sampel independen karena data berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji-t, diperoleh signifikansi sebesar 0,219 (lebih besar dari 0,05) yang artinya tidak cukup bukti untuk menyatakan terdapat penurunan signifikan antara tingkat pengangguran sebelum dan sesudah adanya dana desa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama tahun 2015-2018 (sesudah adanya dana desa) tidak mengalami penurunan signifikan jika dibandingkan tingkat pengangguran selama tahun 2010-2014 (sebelum adanya dana desa).

Perkembangan angka kemiskinan kabupaten hulu sungai tengah

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah berfluktuasi selama tahun 2010 sampai 2018. Angka kemiskinan mencapai titik terendah 5,57 pada tahun 2013 dari yang sebelumnya mencapai 6,32 tahun 2010. Setelah itu, angka kemiskinan terus meningkat hingga mencapai 6,18 pada tahun 2016. Selama dua tahun terakhir, perlahan angka kemiskinan kembali turun hingga menjadi 6,01 pada tahun 2018.

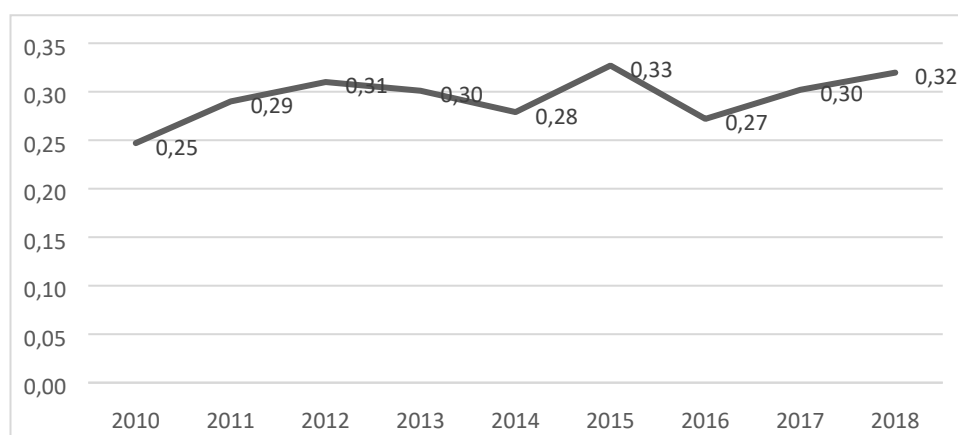


Gambar 5. Angka kemiskinan kabupaten hulu sungai tengah tahun 2010-2018

Hasil pengujian menggunakan Uji Kolmogorov Smirnov menunjukkan data berdistribusi normal sehingga dilanjutkan ke pengujian uji-t sampel independen. Berdasarkan hasil uji-t, diperoleh signifikansi sebesar 0,838 (lebih besar dari 0,05) yang artinya tidak cukup bukti untuk menyatakan terdapat penurunan signifikan antara angka kemiskinan sebelum dan sesudah adanya dana desa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama tahun 2015-2018 (sesudah adanya dana desa) tidak mengalami penurunan signifikan jika dibandingkan angka kemiskinan selama tahun 2010-2014 (sebelum adanya dana desa). Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan ada perbedaan tingkat kemiskinan perdesaan menurut provinsi di Indonesia sebelum dan sesudah adanya dana desa. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya kenaikan tingkat kemiskinan perdesaan meskipun sudah digulirkan dana desa yang besar (Setiawan, 2019).

Perkembangan *gini ratio* kabupaten hulu sungai tengah

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, *gini ratio* Kabupaten Hulu Sungai Tengah berfluktuasi selama tahun 2010 sampai 2018. *Gini ratio* mencapai titik terendah 0,25 pada tahun 2010 dan mencapai titik tertinggi 0,33 pada tahun 2015. Meskipun sempat turun menjadi 0,27 pada tahun 2016, perlahan *gini ratio* kembali meningkat hingga menjadi 0,32 pada tahun 2018.



Gambar 6. *Gini Ratio* Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010-2018

Hasil pengujian menggunakan Uji Kolmogorov Smirnov untuk data *gini ratio* menunjukkan data berdistribusi normal sehingga dilanjutkan ke pengujian uji-t sampel independen. Berdasarkan hasil uji-t, diperoleh signifikansi sebesar 0,144 (lebih besar dari 0,05) yang artinya tidak cukup bukti untuk menyatakan terdapat penurunan signifikan antara *gini ratio* sebelum dan sesudah adanya dana desa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *gini ratio* di Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama tahun 2015-2018 (sesudah adanya dana desa) tidak mengalami penurunan signifikan jika dibandingkan *gini ratio* selama tahun 2010-2014 (sebelum adanya dana desa).

Meskipun pembangunan wilayah perdesaan menunjukkan peningkatan dengan adanya kenaikan IPD yang signifikan, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki agar perekonomian perdesaan bisa bergerak sehingga lapangan kerja di wilayah perdesaan bertambah. Hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya penyerapan tenaga kerja sehingga menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan serta *gini ratio*.

Berdasarkan hasil pendataan podes tahun 2018, terdapat 98,8 persen desa yang sumber penghasilan utama sebagian besar penduduknya dari pertanian. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertanian merupakan pekerjaan mayoritas penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Akan tetapi hanya terdapat 25,5 persen desa yang memiliki saluran irigasi dan hanya tiga perempat desa saja yang menggunakannya untuk pengairan sawah. Hal ini mengindikasikan kurangnya sarana dan prasarana penunjang yang dapat meningkatkan sektor unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menyebabkan perekonomian dari sektor tersebut belum optimal.

Selain itu, dana desa seharusnya merupakan pemantik bagi desa dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan adanya BUMDes, diharapkan desa mampu menggerakkan

perekonomian masyarakatnya sehingga terjadi multiplier effect yang akan dinikmati oleh seluruh masyarakat desa. Multiplier effect yang terjadi akan menciptakan lapangan pekerjaan baru yang dapat menyerap tenaga kerja dari penduduk perdesaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran terbuka sehingga menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan penduduk. Akan tetapi, berdasarkan hasil dari pendataan podes tahun 2018, hanya terdapat 27,9 persen desa yang memiliki BUMDes. Oleh karena itu, evaluasi dari pemerintah daerah terkait pengelolaan dana desa sangat diperlukan. Hal tersebut sangat penting agar dana desa yang direalisasikan oleh pemerintah desa bisa lebih efektif menggerakkan perekonomian di perdesaan sehingga dapat mengurangi permasalahan perdesaan dengan menurunnya tingkat pengangguran terbuka yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan penduduk (*gini ratio*). Dengan demikian tujuan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dapat dicapai dengan pengoptimalan realisasi dana desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pembahasan, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan antara IPD sebelum dan sesudah adanya dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan tingkat pembangunan desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah baik jika dibandingkan dengan kondisi sebelum adanya dana desa. Akan tetapi, hasil pengujian hipotesis tingkat pengangguran, angka kemiskinan, dan *gini ratio* menunjukkan tidak adanya penurunan yang signifikan antara tingkat pengangguran, angka kemiskinan, dan *gini ratio* sebelum dan sesudah adanya dana desa. Evaluasi dari pemerintah terkait realisasi dana desa dan BUMDes sangat diperlukan. Hal tersebut sangat penting agar dana desa yang direalisasikan oleh pemerintah desa lebih efektif dalam menggerakkan perekonomian di perdesaan yang dapat menurunkan tingkat pengangguran, angka kemiskinan, dan *gini ratio* sehingga masyarakat semakin sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmojo, M. E., Fridayani, H. D., Kasiwi, A. N., & Pratama, M. A. (2017). Efektivitas Dana Desa Untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Bangunjiwo. *Aristo (Sosial, Politik, Humaniora)*, 5(1), 126–140.
- Azwardi, & Sukanto. (2014). Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 29–41.
- Badan Pusat Statistik. (2018). Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2018. *Berita Resmi Statistik*, No. 99/12/Th. XXI, 10 Desember 2018.
- Putra, C. K., Pratiwi, R. N., & Suwondo. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1203–1212.
- Setiawan, A. (2019). Analisis Perbedaan Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Perdesaan Sebelum dan Sesudah Digulirkannya Dana Desa. *Akuntabel*, 16(1), 31–35.
- Siegel, Sidney. (1986). *Statistik Non Parametrik untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Terjemahan. Jakarta: PT.Gramedia.
- Todaro, M. P. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Ketujuh*. Erlangga: Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Walpole, Ronald E.. (1982). *Pengantar Statistika Edisi ketiga*, Terjemahan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.